

**BAB V**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017 - 2022**

Bagian ini akan menjelaskan terkait penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi menggunakan perhitungan regresi data panel yaitu menggunakan data *time series* adalah data tahunan yaitu tahun 2017-2022 *cross section* adalah objek data yaitu meliputi 11 kabupaten dan kota (Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab Timur, Tanjab Barat, Tebo, Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh) di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi sebesar 95 persen atau dengan alfa 0,05 persen. Dalam regresi data panel terdapat tiga model persamaan yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) sebagai berikut:

**5.1.1 Common Effect Model**

*Common Effect Model* yaitu model yang mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individu (entitas). Pendekatan yang dipakai adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai teknik estimasinya (Junaidi, 2012). Hasil output regresi data panel menggunakan metode *Common Effect Model* sebagai berikut.

Tabel 5.1 Hasil Estimasi *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.207933	0.064735	3.212042	0.0021
DAU?	1.18E-10	5.27E-11	2.242382	0.0286
INV?	-1.03E-11	5.35E-12	-2.128365	0.0485
MSN?	2.92E-07	3.73E-07	0.781504	0.4375
UMK?	9.43E-09	2.01E-08	0.469605	0.6403
Root MSE	0.026522	R-squared		0.504378
Mean dependent var	0.303788	Adjusted R-squared		0.352206
S.D. dependent var	0.029962	S.E. of regression		0.027588
Akaike info criterion	-4.270138	Sum squared resid		0.046427
Schwarz criterion	-4.104255	Log likelihood		145.9145
Hannan-Quinn criter.	-4.204589	F-statistic		3.917394
Durbin-Watson stat	1.426923	Prob(F-statistic)		0.006775

Sumber: Data Diolah, 2024

Dari Tabel 5.1 pada hasil *Common Effect Model* dari 4 (empat) variable bebas hanya terdapat 2 (dua) variabel yang signifikan pada tingkat  $\alpha$  0,05 persen yaitu dana alokasi umum dan investasi terhadap disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi, sedangkan variabel penduduk miskin dan upah minimum kabupaten tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Nilai *R-squared* 0,504378 artinya disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi sebesar 50,44 persen di pengaruhi oleh dana alokasi umum, investasi, penduduk miskin dan upah minimum kabupaten,

### 5.1.2 *Fixed Effect Model*

*Fixed Effect Model* adalah model yang menunjukkan adanya perbedaan intersep untuk setiap individu (entitas), tetapi intersep individu tersebut tidak bervariasi terhadap waktu (konstan). Jadi, *fixed effect model* diasumsikan bahwa koefisien slope tidak bervariasi terhadap individu maupun waktu (Junaidi, 2012). Hasil output regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* sebagai berikut.

Tabel 5.2 Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.564721	0.196218	2.878026	0.0058
DAU?	-2.08E-10	1.75E-10	-3.192872	0.0038
INV?	1.34E-12	6.71E-12	2.999091	0.0084
MSN?	4.36E-08	3.04E-06	0.014381	0.9886
UMK?	-5.28E-08	2.62E-08	-2.011833	0.0495
Root MSE	0.020465	R-squared		0.726284
Mean dependent var	0.303788	Adjusted R-squared		0.496245
S.D. dependent var	0.029962	S.E. of regression		0.023281
Akaike info criterion	-4.485625	Sum squared resid		0.027643
Schwarz criterion	-3.987976	Log likelihood		163.0256
Hannan-Quinn criter.	-4.288980	F-statistic		4.047111
Durbin-Watson stat	2.230326	Prob(F-statistic)		0.000115

Sumber: Data Diolah, 2024

Dari Tabel 5.2 pada hasil *Fixed Effect Model* dari 4 (empat) variable terdapat 3 (tiga) variabel yang signifikan pada tingkat  $\alpha$  0,05 persen yaitu dana alokasi umum dan investasi, dan upah minimum kabupaten terhadap disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi, sedangkan variabel penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Nilai

*R-squared* 0,726284 artinya disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi sebesar 72,63 persen di pengaruhi oleh dana alokasi umum, investasi, penduduk miskin dan upah minimum kabupaten.

### 5.1.3 *Random Effect Model*

*Random Effect Model* adalah model regresi data panel yang mengestimasi variabel gangguan yang saling memiliki hubungan time series dan *cross section*. Perbedaan intersep model ini yakni diakomodasikan oleh error terms masing-masing individu. Model ini dikenal dengan *Generalized Least Square* (Junaidi, 2012). Hasil output regresi data panel dengan menggunakan metode *Random Effect Model* sebagai berikut.

Tabel 5.3 Hasil Estimasi *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.285488	0.073629	3.877405	0.0003
DAU?	6.77E-11	7.42E-11	2.912021	0.0037
INV?	-4.74E-12	5.69E-12	-0.832034	0.4086
MSN?	5.42E-07	5.47E-07	0.991491	0.3254
UMK?	-1.22E-08	1.93E-08	-2.633930	0.0053
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.014591	0.2820
Idiosyncratic random			0.023281	0.7180
Weighted Statistics				
Root MSE	0.023046	R-squared		0.489615
Mean dependent var	0.165812	Adjusted R-squared		0.329917
S.D. dependent var	0.024339	S.E. of regression		0.023972
Sum squared resid	0.035055	F-statistic		5.501146
Durbin-Watson stat	1.837915	Prob(F-statistic)		0.001304
Unweighted Statistics				
R-squared	0.373217	Mean dependent var		0.303788
Sum squared resid	0.048245	Durbin-Watson stat		1.335412

Sumber: Data Diolah, 2024

Dari tabel 5.3 pada hasil *Random Effect Model* dari 4(empat) variable terdapat 2 (dua) variabel yang signifikan pada tingkat  $\alpha$  0,05 persen yaitu dana alokasi umum

dan upah minimum kabupaten terhadap disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi, sedangkan variabel investasi dan penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Nilai *R-squared* 0,489615 artinya disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi sebesar 48,96 persen di pengaruhi oleh dana alokasi umum, investasi, penduduk miskin dan upah minimum kabupaten.

#### 5.1.4 Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Dari beberapa hasil estimasi regresi data panel terlebih dahulu dilakukan pemilihan model yang terbaik untuk digunakan yang dapat dilihat sebagai berikut:

##### 5.1.4.1 Uji Chow untuk memilih antara model CEM/PLS dengan FEM

Adapun hasil dalam pemilihan model antara *Common effect model* dengan *Fixed Effects Model* sebagai berikut:

Tabel 5.4 Uji Chow Redundant Fixed Effects Tests Model

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.465631	(10,51)	0.0016
Cross-section Chi-square	34.222137	10	0.0002

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5.4 hasil estimasi uji chow dalam menentukan model yang terbaik antara *Common effect model* dengan *Fixed Effects Model* tersebut menunjukkan bahwa nilai prob lebih kecil dibandingkan alfa 0,05 persen dengan signifikansi 95 persen maka ( $0,0002 < 0,05$ ), sehingga model ini hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effects Model* lebih baik dibandingkan model *Common effect model* atau *Pooled Least Squares*.

##### 5.1.4.2 Uji Hausman Untuk Memilih Antara Model FEM dengan REM

Adapun hasil dalam pemilihan model antara *Fixed Effects model* dengan *Random Effects Model* sebagai berikut:

Tabel 5.5 Uji Hausman Correlated Random Effects Model

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7,674662	4	0,1042

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5.5 hasil estimasi uji hausman dalam menentukan model yang terbaik antara *Fixed Effects Model* dengan *Random Effects Model* tersebut menunjukkan bahwa nilai statistic Chi-Square memiliki Prob lebih besar dibandingkan alfa 0,05 persen dengan signifikansi 95 persen maka ( $0,1042 > 0,05$ ), sehingga hipotesis  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Random Effects Model* lebih baik dibandingkan *Fixed Effects model*.

#### 5.1.4.3 Uji Breusch Pagan Untuk Memilih Antara Model CEM/PLS dengan REM

Adapun hasil dalam pemilihan model antara *Common effect model* dengan *Random Effects Model* sebagai berikut:

Tabel 5.6 Lagrange Multiplier Tests for Random Effects Model

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	5.407123 (0.0201)	0.801616 (0.3706)	6.208739 (0.0127)
Honda	2.325322 (0.0100)	-0.895330 (0.8147)	1.011157 (0.1560)
King-Wu	2.325322 (0.0100)	-0.895330 (0.8147)	0.611491 (0.2704)
Standardized Honda	3.488918 (0.0002)	-0.480316 (0.6845)	-1.506367 (0.9340)
Standardized King-Wu	3.488918 (0.0002)	-0.480316 (0.6845)	-1.865181 (0.9689)
Gourieroux, et al.	--	--	5.407123 (0.0268)

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5.6 hasil estimasi uji hausman dalam menentukan model yang terbaik antara *Common effect model* dengan *Random Effects Model* tersebut menunjukkan bahwa nilai statistic Chi-Square memiliki Prob lebih kecil dibandingkan alfa 0,05 persen dengan signifikansi 95 persen maka ( $0,0127 < 0,05$ ), sehingga hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model *Random Effects Model* lebih baik dibandingkan *Common effect model* atau *Pooled Least Squares*. Berdasarkan uji pemilihan model. Maka berdasarkan hasil

perbandingan antar model tersebut terpilih model *Random Effects Model* yang terbaik untuk di gunakan dalam analisis data panel tersebut.

### 5.1.5 Interpretasi Hasil *Random Effects Model*

Berdasarkan hasil pemilihan model maka yang terpilih adalah *Random Effects Model*. Maka di peroleh hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 5.7 Estimasi Data Panel *Random Effects Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.285488	0.073629	3.877405	0.0003
DAU?	6.77E-11	7.42E-11	2.912021	0.0037
INV?	-4.74E-12	5.69E-12	-0.832034	0.4086
MSN?	5.42E-07	5.47E-07	0.991491	0.3254
UMK?	-1.22E-08	1.93E-08	-2.633930	0.0053
Random Effects (Cross)				
_KRC--C	-0.004154			
_MRN--C	0.001549			
_SRL--C	0.004625			
_BH--C	-0.003646			
_MJ--C	-0.004255			
_TT--C	-0.021040			
_TB--C	-0.011825			
_TBO--C	-0.008956			
_BGO--C	0.010171			
_KJ--C	0.018249			
_KSP--C	0.019283			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.014591	0.2820
Idiosyncratic random			0.023281	0.7180
Weighted Statistics				
Root MSE	0.023046	R-squared		0.489615
Mean dependent var	0.165812	Adjusted R-squared		0.329917
S.D. dependent var	0.024339	S.E. of regression		0.023972
Sum squared resid	0.035055	F-statistic		5.501146
Durbin-Watson stat	1.837915	Prob(F-statistic)		0.001304
Unweighted Statistics				
R-squared	0.373217	Mean dependent var		0.303788
Sum squared resid	0.048245	Durbin-Watson stat		1.335412

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5.7 hasil regresi data panel dengan model terpilih *Random Effects Model* sehingga persamaan regresi diperoleh sebagai berikut:

$$DP = 0,285488 + 0,000677 \text{ DAU} - 0,000474 \text{ INV} + 0,000542 \text{ MSN} - 0,000122 \text{ UMK} + e$$

Berdasarkan hasil estimasi *Random Effects Model* adalah jika terjadi perubahan antara variabel dana alokasi umum, investasi, penduduk miskin dan upah minimum kabupaten baik antar kabupaten dan kota maupun antar waktu, maka nilai konstanta sebesar 0,285488 persen, artinya jika dana alokasi umum, investasi, penduduk miskin dan upah minimum kabupaten tetap maka disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi meningkat sebesar 0,28 persen. Berikut adalah penjelasan hasil estimasi dari persamaan koefisien regresi yaitu:

1. Nilai koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 0,000677, hal ini diartikan jika dana alokasi umum meningkat satu miliar rupiah maka disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi meningkat sebesar 0,000677 persen.
2. Nilai koefisien regresi investasi sebesar -0,000474, hal ini diartikan jika investasi meningkat satu miliar rupiah maka disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi menurun sebesar 0,000474 persen.
3. Nilai koefisien regresi penduduk miskin sebesar 0,000542, hal ini diartikan jika penduduk miskin meningkat seribu jiwa maka disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi meningkat sebesar 0,000542 persen.
4. Nilai koefisien regresi upah minimum kabupaten sebesar -0,000122, hal ini diartikan jika upah minimum kabupaten meningkat seratus ribu rupiah maka disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi menurun sebesar 0,000122 persen.

#### **5.1.6 Hasil Pengujian Hipotesis**

Uji hipotesis bertujuan untuk melihat pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependen yang dilakukan pengujian sebagai berikut:

##### **5.1.6.1 Uji F statistik**

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dilakukan dengan Uji F-Statistik. Jika nilai Prob (F-statistic) lebih kecil

dibandingkan dengan  $\alpha$ , maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Pada table 5.7 hasil estimasi diketahui bahwa nilai prob  $0,001304 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya variabel dana alokasi umum, investasi, penduduk miskin dan upah minimum kabupaten secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.

### 5.1.6.2 Uji t Statistik

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh individu dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai Prob (t-statistic) lebih kecil dibandingkan dengan  $\alpha$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya apabila nilai Prob (t-statistic) lebih besar dibandingkan dengan  $\alpha$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.8 Uji t Statistik Secara Parsial pada *Random Effects Model*

Variabel	Prob	Alfa	Keterangan
DAU?	0,0037	0,05	Signifikan
INV?	0,4086	0,05	Tidak Signifikan
MSN?	0,3254	0,05	Tidak Signifikan
UMK?	0,0053	0,05	Signifikan

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi yang memiliki prob sebesar  $0,0037 < 0,05$  maka hipotesis diterima. Namun investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi yang memiliki prob sebesar  $0,4086 > 0,05$  maka hipotesis di tolak, serta penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi yang memiliki prob sebesar  $0,3254 > 0,05$  maka hipotesis di tolak. Sedangkan upah minimum kabupaten berpengaruh signifikan



terhadap disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi yang memiliki prob sebesar  $0,0053 < 0,05$  maka hipotesis diterima.

### 5.1.7 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dari hasil pengujian diperoleh koefisien determinasi dilihat dari table 5.7 bahwa nilai R Square sebesar 0,489615, artinya sebesar 48,96 persen disparitas pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi jelaskan oleh variabel dana alokasi umum, investasi, penduduk miskin dan upah minimum kabupaten, sedangkan sisanya 51,04 persen dijelaskan variabel lainnya yang tidak dimasukkan didalam penelitian ini.

### 5.1.8 Intersep Random Effect Model

Dari hasil estimasi dengan menggunakan *Random Effects Model* dapat dijelaskan bahwa masing – masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi memiliki nilai intersep yang berbeda – beda. Maka hasil pengaruh *random effect model* sebagai berikut:

Tabel 5.9 Koefisien Intersep Kabupaten dan Kota Pada *Random Effects Model*

Kabupaten dan Kota	Random Effect	Kostanta	Random Effect Model
_KRC--C	-0,004154	0,285488	0,281334
_MRN--C	0,001549	0,285488	0,287037
_SRL--C	0,004625	0,285488	0,290113
_BH--C	-0,003646	0,285488	0,281842
_MJ--C	-0,004255	0,285488	0,281233
_TT--C	-0,021040	0,285488	0,264448
_TB--C	-0,011825	0,285488	0,273663
_TBO--C	-0,008956	0,285488	0,276532
_BGO--C	0,010171	0,285488	0,295659
_KJ--C	0,018249	0,285488	0,303737
_KSP--C	0,019283	0,285488	0,304771

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5.9 tersebut dapat dilihat bahwa nilai intersep dengan menggunakan hasil estimasi yang diperoleh *Random Effects Model* dapat dijelaskan bahwa jika terjadi perubahan variabel dana alokasi umum, investasi, penduduk miskin dan upah minimum kabupaten baik antar kabupaten dan kota maupun antar waktu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kabupaten Kerinci akan mendapatkan pengaruh *random effect* terhadap disparitas pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2017 - 2022 meningkat sebesar 0,281334 persen.
2. Kabupaten Merangin akan mendapatkan pengaruh *random effect* terhadap disparitas pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2017 - 2022 meningkat sebesar 0,287037 persen.
3. Kabupaten Sarolangun akan mendapatkan pengaruh *random effect* terhadap disparitas pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2017 - 2022 meningkat sebesar 0,290113 persen.
4. Kabupaten Batanghari akan mendapatkan pengaruh *random effect* terhadap disparitas pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2017 - 2022 meningkat sebesar 0,281842 persen.
5. Kabupaten Muaro Jambi akan mendapatkan pengaruh *random effect* terhadap disparitas pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2017 - 2022 meningkat sebesar 0,281233 persen.
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mendapatkan pengaruh *random effect* terhadap disparitas pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2017 - 2022 meningkat sebesar 0,264448 persen.
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mendapatkan pengaruh *random effect* terhadap disparitas pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2017 - 2022 meningkat sebesar 0,273663 persen.
8. Kabupaten Tebo akan mendapatkan pengaruh *random effect* terhadap disparitas pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2017 - 2022 meningkat sebesar 0,276532 persen.
9. Kabupaten Bungo akan mendapatkan pengaruh *random effect* terhadap disparitas pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2017 - 2022 meningkat sebesar 0,295659 persen.

10. Kota Jambi akan mendapatkan pengaruh *random effect* terhadap disparitas pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2017 - 2022 meningkat sebesar 0,303737 persen.
11. Kota Sungai Penuh akan mendapatkan pengaruh *random effect* terhadap disparitas pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tahun 2017 - 2022 meningkat sebesar 0,304771 persen.

#### **5.1.9 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Disparitas Pendapatan**

Dana lokasi umum berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan, karena DAU disesuaikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Dapat diartikan bahwa DAU merupakan transfer yang bersifat umum untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Widjaja, 2017) .

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Badrudin, 2012). Yang tujuannya untuk meminimalkan atau mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Antar Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat berharap dengan adanya desentralisasi fiskal atau otonomi daerah, pemerintah daerah lebih memaksimalkan atau mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan sebaik mungkin. Pemerintah daerah dengan adanya Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat maka bisa lebih fokus untuk menggunakan pendapatan asli daerah yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik. DAU ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin sedikit DAU yang diperoleh daerah tersebut maka ketergantungan daerah tersebut dalam memenuhi belanja daerah terhadap pemerintah pusat tidak terlalu signifikan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Syurya dkk (2020) menunjukkan bahwa DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. Penelitian Amanda dkk (2020) Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) yang dimiliki efek positif yang konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi regional, keduanya merupakan block grant yang sampai batas tertentu terkaitlebih diskresi kepada pemerintah daerah dalam hal penggunaan dana. Penelitian Wijayanti dkk (2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

#### **5.1.10 Pengaruh Investasi Terhadap Disparitas Pendapatan**

Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan karena Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru, investasi juga bisa juga dipakai untuk alat pemerataan, baik pemerataan antar daerah, antar sektor dan antarperorangan. Investasi sebagai alat pemerataan ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri atau dibiarkan berjalan menuruti mekanisme pasar tetapi harus ada intervensi pemerintah. Pesatnya penanaman modal baik lokal maupun asing di suatu negara merupakan suatu indikator bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik, karena didukung oleh kecukupan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Apalagi jaminan keamanan, serta stabilitas sosial politik yang terjaga.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu Masyarakat terus menerus akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dimana Indonesia mengalami penekanan jumlah penduduk yang makin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin meningkat karena belum seimbangny kegiatan ekonomi khususnya kesempatan kerjayang tersedia sehingga menciptakan permasalahan pokok yaitu pengangguran. Menjadi perhatian penting adalah ketika investasi terkonsentrasinya pada beberapa daerah saja. Hal ini didasari oleh para investor yang lebih memilih untuk menanamkan modalnya pada daerah yang memiliki

infrastruktur yang baik. Hal ini membuat daerah yang banyak menerima investasi dengandaerah yang kurang menerima investasi akan memiliki perbedaan dalam pendapatan yang diperoleh masyarakatnya sehingga dapat meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan Masyarakat.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Maksudjan *et al* (2023) Hasilnya mengkonfirmasi bahwa FDI mempengaruhi ketimpangan secara negatif. Namun, dampak FDI lebih efektif dengan adanya modal manusia. Artinyamodal manusia memperdalam efek FDI terhadap ketimpangan; negara akanlebih efektif dalam mengurangi ketimpangan dengan memiliki tingkatmodal manusia yang lebih tinggi dan menganggapnya sebagai alat yanglebih kuat untuk mewujudkan kesetaraan. Untuk mengurangiketimpangan, disarankan agar dilakukan bauran kebijakan antara FDI dan HC. Penelitian oleh Penelitian Miguel *et al* (2021) menunjukkan bahwa investasi asing langsung (FDI) dan pengeluaran infrastruktur berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan, meskipun pada akhirnya FDI membantu menurunkan ketimpangan. Demikian pula, peningkatan investasi swasta dalam negeri dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan.

#### **5.1.11 Pengaruh Penduduk Miskin Terhadap Disparitas Pendapatan**

Penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan karena Menurut Sukirno, (2018) perkembangan jumlah penduduk miskin merupakan faktor yang mendorong dan menghambat dalam pembangunan. Dikatakan sebagai faktor pendorong karena adanya kemungkinan semakin banyak penduduk yang tidak produktif yang dihasilkan, lalu dikatakan sebagai penghambat jika pembangunan memberikan penurunan dalam produktivitas serta terjadinya banyak orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang mengakibatkan tidak mampunya dalam memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya.

Jumlah penduduk miskin setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan tentu saja hal ini belum tentu berdampak pada ketimpangan pendapatan. Bertambahnya jumlah penduduk miskin bisa disebabkan oleh proses migrasi, jumlah pengangguran dan daya beli masyarakat yang rendah. Menurut Arsyad, (2016) masalah

kependudukan mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan yaitu pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah maupun antar daerah perdesaan dan perkotaan.

Indikator kemiskinan yang tinggi akan berdampak terhadap tingkat pendapatan. Seseorang yang menjadi pengangguran tentu tidak mempunyai penghasilan dari pekerjaan. Kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi membuat mereka bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi secara baik, dampaknya mereka akan menjadi miskin dan mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin membengkak dan meningkatkan jumlah ketimpangan. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi secara baik, dampaknya bagi mereka akan menjadi miskin dan mengakibatkan membengkaknya jumlah penduduk miskin dan akan meningkatkan ketimpangan.

Penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Penelitian Federico (2014) yang berjudul *Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak penduduk miskin terhadap ketimpangan pendapatan. Metode penelitian menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, hal ini dikarena memiliki pendidikan dan keterampilan yang tinggi.

#### **5.1.12 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Disparitas Pendapatan**

Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan karena Secara teori, teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum akan meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang menguranginya. Upah minimum menyebabkan, non-pasar, berperan menentukan batas minimum upah di pasar tenaga kerja, yang meningkatkan harga tenaga kerja. Dengan meningkatnya harga tenaga kerja, upah minimum menghasilkan pengurangan permintaan tenaga kerja dan sebahagian pekerja akan menjadi pengangguran. Di sisi lain, institusional ekonom berpendapat bahwa upah minimum mengurangi ketimpangan. Upah minimum redistribusi pendapatan dengan menurunkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan upah pekerja terendah (Mankiw, 2016).

Dengan demikian, dengan menetapkan upah minimum maka standar upah akan lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil (Todaro, 2019). Secara empiris, beberapa studi telah secara eksplisit mencoba meneliti efek dari upah minimum terhadap ketimpangan. Dalam konteks Indonesia, Islam dan Nazara (2017) mengambil pendekatan tidak langsung untuk mengklaim bahwa upah minimum di Indonesia bukanlah kebijakan yang buruk dari segi profitabilitas perusahaan. Mereka menemukan bahwa kebijakan upah minimum tersebut tidak menyebabkan pengurangan profitabilitas bisnis bahkan setelah mengontrol faktor endogenitas upah minimum. Cun dan Khor (2018) menemukan bahwa perubahan dalam undang-undang upah minimum merupakan faktor penting dan relevan memberikan kontribusi untuk memperlambat ketimpangan upah antara bagian atas dan bawah dari distribusi upah dan pendapatan di Indonesia.

Rama (2021) melakukan penelitiannya dengan memperlakukan kenaikan upah minimum sebagai variabel eksogen dan pada analisis tingkat provinsi, ia menemukan bahwa kebijakan upah minimum memiliki efek menaikkan upah rata-rata kurang dari 15% dan penurunan lapangan kerja maksimal 5%, sehingga mengarah pada kesimpulan bahwa pada umumnya upah minimum bermanfaat bagi pekerja sektor formal, tetapi efek tersebut ditemukan secara tidak proporsional pada perusahaan-perusahaan kecil yang sangat bergantung pada tenaga kerja berketerampilan rendah dan cenderung untuk berinvestasi dalam teknologi. Tapi penelitian pendahulu yang dilakukan oleh Volscho (2018) dengan menggunakan data negara untuk menguji hipotesis, menyatakan bahwa negara dengan upah minimum yang lebih tinggi memiliki level ketimpangan pendapatan keluarga yang lebih rendah dan bahwa upah minimum negara mengurangi ketimpangan pendapatan keluarga.

## **5.2 Perbedaan Disparitas Pendapatan Kabupaten dan Kota Terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2022**

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya memiliki target untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan

yang lebih merata. Kebijakan otonomi daerah adalah sarana untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik. Melalui kebijakan ini pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan. Pemerintah daerah akan lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia pada masing-masing daerah dan penyediaan barang-barang publik untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

Terjadinya gap atau jurang kesejahteraan antar wilayah atau daerah akan mendorong terjadinya ketimpangan pendapatan dan memperbesar kemiskinan antar daerah atau wilayah. Ketimpangan pendapatan sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan, sangat dirasakan hingga sampai saat ini. Dimana masyarakat di daerah perkotaan khususnya perkotaan memiliki pendapatan yang cenderung lebih tinggi dan lebih merata dibanding pendapatan yang diterima oleh masyarakat di daerah pedesaan atau kabupaten. Ketimpangan pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat atas output (barang atau jasa). Daya beli masyarakat yang rendah, maka akan menghambat aktivitas ekonomi dalam menghasilkan output. Peningkatan output yang terhambat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga terhambat. Terbatasnya output (barang dan jasa) yang dihasilkan mendorong terbatasnya lapangan kerja yang mampu diciptakan serta upah (pendapatan) yang diterima. Lapangan pekerjaan yang terbatas membuat masyarakat tidak akan memperoleh pendapatan dan pada akhirnya akan menimbulkan kemiskinan.

Permasalahan ketimpangan pembangunan yang membawa akibat timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi, yang sangat dirasakan sampai saat ini, terutama antara daerah dan kota. Ketimpangan pendapatan yang terjadi memberi dampak terhadap upaya meningkatkan pembangunan ekonomi antar kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dimasa datang. Menurut BPS (2023), Provinsi Jambi sebagai Provinsi yang memiliki 9 Kabupaten dan 2 Kota yang secara geografis memiliki letak dan sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga akan menciptakan ketimpangan di masing-masing daerah tersebut, berikut adalah estimasi untuk melihat dampak perbedaan disparitas pendatan dengan uji *Independent Samples Test* sebagai berikut:



**Tabel 5.10 Independent Samples Test**

Disparitas Pendapatan	Sig. (2-tailed)	Alfa	Kriteria
Kerinci	0.001	0,05	Signifikan
Merangin	0.478	0,05	Tidak Signifikan
Sarolangun	0.178	0,05	Tidak Signifikan
Batanghari	0.025	0,05	Signifikan
Muaro Jambi	0.117	0,05	Tidak Signifikan
Tanjab Timur	0.000	0,05	Signifikan
Tanjab Barat	0.046	0,05	Signifikan
Tebo	0.004	0,05	Signifikan
Bungo	0.267	0,05	Tidak Signifikan
Kota Jambi	0.145	0,05	Tidak Signifikan
Kota Sungai Penuh	0.029	0,05	Signifikan

**Sumber: Data diolah, 2024**

Pada tabel 5.10 diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan uji indepent sampel t- test diketahui dampak disparitas pendapatan antar daerah terhadap Provinsi Jambi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kabupaten Kerinci diperoleh nilai Sig. (2.tailed) sebesar  $0,001 < 0,05$  yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara disparitas pendapatan di Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi.
2. Kabupaten Merangin diperoleh nilai Sig. (2.tailed) sebesar  $0,478 > 0,05$  yang membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara disparitas pendapatan di Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi.
3. Kabupaten Sarolangun diperoleh nilai Sig. (2.tailed) sebesar  $0,178 > 0,05$  yang membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara disparitas pendapatan di Kabupaten Sarolangun dan Provinsi Jambi.
4. Kabupaten Batanghari diperoleh nilai Sig. (2.tailed) sebesar  $0,025 < 0,05$  yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara disparitas pendapatan di Kabupaten Batangharii dan Provinsi Jambi.
5. Kabupaten Muaro Jambi diperoleh nilai Sig. (2.tailed) sebesar  $0,117 > 0,05$  yang membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara disparitas pendapatan di Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Jambi.

6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperoleh nilai Sig. (2.tailed) sebesar 0,000 < 0,05 yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara disparitas pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Provinsi Jambi.
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh nilai Sig. (2.tailed) sebesar 0,046 < 0,05 yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara disparitas pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Jambi.
8. Kabupaten Tebo diperoleh nilai Sig. (2.tailed) sebesar 0,004 < 0,05 yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara disparitas pendapatan di Kabupaten Tebo dan Provinsi Jambi.
9. Kabupaten Bungo diperoleh nilai Sig. (2.tailed) sebesar 0,267 > 0,05 yang membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara disparitas pendapatan di Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi.
10. Kota Jambi diperoleh nilai Sig. (2.tailed) sebesar 0,145 > 0,05 yang membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara disparitas pendapatan di Kota Jambi dan Provinsi Jambi.
11. Kota Sungai Penuh diperoleh nilai Sig. (2.tailed) sebesar 0,029 < 0,05 yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara disparitas pendapatan di Kota Sungai Penuh dan Provinsi Jambi.

Sehingga dapat disimpulkan dari 9 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Jambi terdapat 5 Wilayah yang terdiri dari Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Bungo dan Kota Jambi tidak terdapat perbedaan disparitas pendapatan pada Provinsi Jambi, sedangkan ada 6 Wilayah yang terdiri dari Kerinci, Batanghari, Tanjab Timur, Tanjab Barat, Tebo dan Kota Sungai Penuh terdapat perbedaan yang signifikan disparitas pendapatan pada Provinsi Jambi.

### **5.3 Implikasi dan Kebijakan**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi, sedangkan dana alokasi umum, investasi dan upah minimum kabupaten berpengaruh

terhadap disparitas pendapatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi. Hal ini dibuktikan kembali dengan besarnya ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten dan Kota terhadap disparitas pendapatan Provinsi Jambi, dari 9 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Jambi terdapat 5 Kabupaten yang terdiri dari Kerinci, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Tebo yang memiliki dampak disparitas pendapatan terhadap Provinsi Jambi, sedangkan ada 4 Kabupaten dan 2 Kota yang terdiri dari Merangin, Sarolangun, Batanghari, Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh yang tidak memiliki dampak disparitas pendapatan terhadap Provinsi Jambi.

Memang permasalahan yang sering muncul pada disparitas pendapatan setiap daerah berbeda-beda hal ini disebabkan karena perekonomian dan sumber daya yang diperoleh setiap daerah berbeda-beda, maka akan berdampak pada anggaran yang diperoleh seperti dana alokasi umum, investasi yang tidak merata, dan upah minimum yang setiap daerah berbeda maka akan menimbulkan disparitas pendapatan tersebut, namun untuk penduduk miskin di setiap daerah yang relative sehingga kurang berpengaruh terhadap disparitas pendapatan. Kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan dampak yang signifikan dari dana alokasi umum, investasi dan upah minimum pada disparitas pendapatan setiap daerah.

Realisasi APBD yang terkait di dalam dana alokasi umum di setiap daerah berbeda-beda Pemerintah pusat perlu untuk meningkatkan besaran dana alokasi umum yang dialokasikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, meningkatkan pengawasan dan deregulasi terkait realisasi belanja dana alokasi khusus, meningkatkan porsi pembagian dana bagi hasil pajak kepada daerah tidak bersangkutan dan menciptakan iklim pertumbuhan perekonomian inklusif, yang bertujuan untuk menekan angka disparitas pendapatan antar daerah.

Investasi merupakan penanaman modal dipercaya dapat menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga dapat mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Berdasarkan hasil perhitungan investasi berdampak positif dalam ketimpangan. Artinya investasi dapat meningkatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Namun demikian investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga dampak yang diberikan sangat berarti, sehingga pemerintah perlu berupaya meningkatkan pemerataan investasi di setiap daerah.

Pendapatan perkapita antar kabupaten dan kota di Provinsi Jambi merupakan tolak ukur dalam menentukan tingkat upah di setiap daerah sehingga hasil perhitungan upah minimum kabupaten berdampak negatif dalam disparitas pendapatan, artinya dengan adanya tingkat upah minimum mampu menurunkan distribusi pendapatan antar daerah. Peran kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak peningkatan tingkat upah di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sehingga terjadinya pemerataan dalam distribusi pendapatan.